

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MANGKUBUMI DI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

PURNAMASARI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya?. Konsep dasar penelitian ini terdiri dari satu variabel tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan narasumber sebanyak 10 orang terdiri dari 6 masyarakat serta wali murid, 3 Guru dan 1 Kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya belum mencapai hasil yang optimal. Hambatan yang di hadapi yaitu dikarenakan belum adanya Guru Pembimbing Khusus serta kurangnya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan biaya operasional yang ada serta guru pamong yang ada tetap menyampaikan materi pembelajaran yang ada agar proses kegiatan belajar tetap berjalan hingga siswa berkebutuhan khusus mengerti dengan materi yang disampaikan guru pamong.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak

hasil kajian ilmiah yang menyatakan bahwa besarnya suatu bangsa antara lain dikarenakan oleh pendidikan. Terdapat hubungan kuat antara pendidikan sebagai sarana pengembang

sumber daya manusia dengan kualitas dan kemajuan suatu bangsa yang adil dan makmur. Pendidikan yang mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. pendidikan sangat dibutuhkan oleh manusia sejak ia lahir sampai meninggal dunia (*long life education*). Selain itu peran pendidikan juga sangat besar dalam memajukan suatu bangsa yaitu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri.

Tujuan pendidikan yang mulia tersebut hendaknya dijadikan cita-cita pendidikan yang ideal. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara *stakeholder* yang peduli akan pendidikan dengan pihak pemerintah. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan, hal tersebut dikarenakan pemerintah adalah sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menciptakan pemerataan pendidikan adalah kebijakan tentang program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif adalah suatu kebijakan pemerintah dalam

mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh anak berkebutuhan khusus agar bisa bersekolah serta memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Sekolah inklusif berusaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus supaya bisa belajar di sekolah reguler. Sebagai pembaharuan pendidikan, pendidikan inklusif lahir karena banyaknya anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah jumlahnya sedangkan akses pendidikannya terbatas, karena lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten tetapi hampir di seluruh wilayah (kecamatan/desa). Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi SLB jauh dari rumah, sedangkan SD terdekat tidak bisa menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan putus sekolah. Akibat lebih lanjut, program wajib belajar pendidikan dasar akan sulit tercapai.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari pendidikan inklusif berdasar dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa adalah sebagai berikut (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecardasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuannya. (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditentukan bahwa setiap warga negara usia sekolah berhak memperoleh pemerataan

pendidikan yang layak dan bermutu, sehingga pemerintah kini lebih bijak dengan memberi perhatian bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus agar bisa belajar sejajar dengan mereka yang normal dengan cara menyelenggarakan pendidikan inklusif. Begitupun halnya dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, bahwasanya penyelenggaraan pendidikan inklusif diselenggarakan di sekolah inklusif. Sekolah ini merupakan sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan peserta didik yang normal.

Program kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sendiri sudah menunjuk beberapa sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, dan khusus untuk di Kecamatan Mangkubumi yaitu: SDN 1 Mangkubumi. Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa program penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 1 Mangkubumi masih terdapat beberapa masalah, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal itu terlihat dari adanya indikator sebagai berikut (1) Sampai saat ini pemerintah belum mengangkat guru pembimbing khusus di SDN 1 Mangkubumi yang secara kompetensi memiliki keahlian untuk memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. (2) Belum dilengkapinya sarana dan prasarana

pendidikan inklusif seperti perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. (3) Jumlah anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Mangkubumi masih sedikit yang terdaftar di sekolah, dikarenakan masyarakat kurang memahami program pendidikan inklusif, karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah tentang Pendidikan Inklusif.

Bertitik tolak dari pendahuluan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya".

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. (1) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya?. (2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya?. (3) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi

di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Surakhmad (1984 : 140) mengemukakan pengertian dari metode penelitian deskriptif analisis adalah sebagai berikut. Metode deskriptif analisis adalah suatu pemecahan masalah yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pelaksanaan metode deskriptif analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut.

Metode deskriptif pada dasarnya mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana ilmiah. Penulis bertindak sebagai pengamat, dan hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi dengan suasana ilmiah. Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan, tidak berusaha memanipulasi variabel, karena kehadirannya mungkin mempengaruhi gejala, penulisan harus memperkecil pengaruh tersebut.

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut dari seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek lain. Sedangkan definisi operasional variabel adalah definisi yang menunjukkan indikator-indikator yang sesuai dengan gejala sehingga memudahkan pengukurannya.

Teknik Pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. (1) Studi kepustakaan dan Teknik Studi (2) Studi lapangan, yakni terdiri dari teknik Observasi, Wawancara. Penelitian ini menggunakan narasumber sebanyak 10 orang terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah, 3 orang Guru, 3 orang masyarakat dan 3 orang wali murid.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapat dari tanggapan atau jawaban hasil wawancara dengan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

Setelah data terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Lama penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan, terhitung mulai dari Bulan Agustus 2015 sampai dengan Bulan Februari 2016.

LANDASAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi kongkret

atau nyata. Grindle (1980: 7) menyatakan Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Ealau dan Prewitt dalam Edi Suharto (2005 : 7) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi tersebut dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Abdullah dan Smith dalam Tachjan (2006 : 26) unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah 1. Unsur Pelaksana (*implementor*) 2. Adanya program yang akan dilaksanakan 3. *Target groups*.

2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan konsekuensi lanjut dari kebijakan global *Education for All* (Pendidikan untuk semua) yang dicanangkan oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 1990. Kebijakan *Education for All* itu sendiri merupakan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam pendidikan yang dicanangkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1949. Konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang tidak diskriminatif atas dasar hambatan fisik, etnisitas, agama, bahasa, gender dan kecakapan. Pendidikan inklusif yang dideklarasikan dalam Konferensi Dunia tentang Pendidikan (mereka yang membutuhkan) kebutuhan khusus di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994 bahwasanya Prinsip mendasar pendidikan inklusif yaitu mengikutsertakan anak berkelainan dikelas reguler bersama dengan anak-anak normal lainnya, berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali.

Model pendidikan khusus tertua adalah model *segregation* yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator. Namun, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Model segregasi tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa dan yang tidak kalah penting adalah model segregasi relatif mahal.

Kemudian pada pertengahan abad XX muncul model *mainstreaming*. Belajar dari berbagai kelemahan model segregasi, model *mainstreaming* memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Dan model inilah yang saat ini dengan istilah pendidikan inklusif.

Jadi, melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan di didik bersama-sama anak lainnya (normal), untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Yang mana pendidikan inklusif ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi semua siswa, tanpa melihat kondisi fisiknya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat keberagaman yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu komunitas. Dan keberagaman itu justru akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menciptakan suatu dorongan untuk saling menghargai, saling menghormati dan toleransi.

Pendidikan inklusif menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) (Smith, 2009 : 18) adalah : "Sebuah proses yang memusatkan perhatian pada dan merespon keanekaragaman kebutuhan semua siswa melalui partisipasi dalam belajar, budaya dan komunitas, dan mengurangi eksklusif dalam dan dari pendidikan".

Pendidikan inklusif adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus disekolah reguler (SD,SMP,SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya, Lay Kekeh Marthan (2007 : 145).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau

para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

REKAPITULASI JAWABAN NARASUMBER MENGENAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MANGKUBUMI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

No.	INDIKATOR	JAWABAN NARASUMBER
1.	Adanya kelompok kerja penyelenggaraan pendidikan inklusif	Kelompok kerja penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Mangkubumi dapat memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggaraan serta mau menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Walaupun dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pendidikan inklusif belum optimal
2.	Kinerja kelompok kerja penyelenggara pendidikan inklusif	Kelompok kerja penyelenggaraan pendidikan inklusif melakukan koordinasi yang baik kepada anggota kelompok guna tercapainya tujuan dari pendidikan inklusif
3.	Sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	Secara garis besar sosialisasi ini bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah termasuk di dalamnya program wajib belajar
4.	Identifikasi, asesmen peserta didik berkebutuhan khusus	Hasil dari wawancara mengenai identifikasi asesmen peserta didik berkebutuhan khusus yaitu penjarangan, pencatatan anak berkebutuhan khusus yang bertujuan untuk pendataan. Meskipun tidak mengerti
5.	Dilengkapinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif dan guru pembimbing khusus	Sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif dan guru pembimbing khusus merupakan unsur penting terlaksananya pendidikan inklusif
6.	Interaksi sosial dan sikap saling menghargai sesama siswa SD Negeri 1 Mangkubumi	Interaksi sosial dan sikap saling menghargai merupakan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif dimana adanya pengakuan dari siswa normal kepada anak berkebutuhan khusus, merupakan hal baik bagi mental anak berkebutuhan khusus.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA MENGENAI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MANGKUBUMI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

No.	INDIKATOR	JAWABAN NARASUMBER
1.	Adanya kelompok kerja penyelenggaraan pendidikan inklusif	Hambatan yang dihadapi adalah faktor sarana prasarana dan guru pembimbing khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif. Masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus masih enggan mendaftarkan anaknya bersekolah selain itu hambatan yang dihadapi adalah biaya operasional untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif
2.	Kinerja kelompok kerja penyelenggara pendidikan inklusif	Hambatan yang dihadapi dalam kinerja kelompok penyelenggaraan pendidikan inklusif biaya operasional yang terbatas sehingga sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menyeluruh serta respon yang kurang baik dari wali murid.
3.	Sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	Hambatan yang dihadapi biaya operasional yang terbatas sehingga tidak menyeluruhnya sosialisasi pendidikan inklusif di Kecamatan Mangkubumi kegiatan sosialisasi yang sering kali hanya dihadiri orang yang sama dan waktu sosialisasi yang tidak tepat dengan jam kerja orang tua
4.	Identifikasi, asesmen peserta didik berkebutuhan khusus	Hambatan yang sering kali dihadapi adalah sikap acuh dari orangtua anak berkebutuhan khusus. Tim identifikasi, asesmen sering kali tidak di respon oleh masyarakat saat melakukan pendataan atau penjangingan
5.	Dilengkapinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif dan guru pembimbing khusus	Hambatan yang dihadapi kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif karena tidak adak sarana prasarana penunjang kegiatan belajar. Tidak adanya guru pembimbing membuat guru biasa bekerja extra dalam penyampaian kegiatan belajar
6.	Interaksi sosial dan sikap saling menghargai sesama siswa SD Negeri 1 Mangkubumi	Hambatan yang dihadapi adalah memupuk rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus untuk berteman dengan siswa yang normal. Siswa normal sering kali gengsi bila harus berinteraksi dengan siswa yang berkebutuhan khusus

Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Kelompok Kerja Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Untuk mengetahui mengenai upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mangkubumi Kecamatan Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang pegawai SD Negeri 1 Mangkubumi

REKAPITULASI UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MANGKUBUMI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA

No.	INDIKATOR	JAWABAN NARASUMBER
1.	Adanya kelompok kerja penyelenggaraan pendidikan inklusif	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan memaksimalkan sarana prasana yang ada, terus memberi motivasi kepada orang tua murid agar mau menyekolahkan anaknya di sekolah formal dan mencari alternatif sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif
2.	Kinerja kelompok kerja penyelenggara pendidikan inklusif	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan memanfaatkan biaya yang ada untuk penyelenggaraan sosialisasi, menyakinkan orang tua murid bahwa tidak adanya perbedaan bagi siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus dan menjelaskan penyelenggaraan pendidikan inklusif hingga dimengerti masyarakat
3.	Sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan memaksimalkan modal (biaya operasional) yang ada, menghilangkan paradigma masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus akan dikucilkan dan terus mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif hingga benar dipahami masyarakat. Mencari waktu yang tepat dengan jam kerja masyarakat.
4.	Identifikasi, asesmen peserta didik berkebutuhan khusus	Secara umum upaya mengatasi hambatan yaitu dengan dana yang ada kegiatan indentifikasi, asesmen peserta didik harus terus berjalan, tim terus melakukan koordinasi hingga direspon dengan baik oleh masyarakat saat penjangiran dan pendataan
5.	Dilengkapinya sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif dan guru pembimbing khusus	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu guru pamong berusaha memanfaatkan sarana prasarana yang ada supaya kegiatan belajar tetap efektif, karena proses belajar harus tetap berlangsung maka guru pamong bekerja

		ekstra agar materi pembelajaran tetap sampai (dimegerti) siswa berkebutuhan khusus. Mencari alternatif, sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung.
6.	Interaksi sosial dan sikap saling menghargai sesama siswa SD Negeri 1 Mangkubumi	Upaya dalam mengatasi dalam hal ini adalah dengan membuat kelompok dalam kelas dimana anggotanya dicampur antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Meyakinkan kepada siswa berkebutuhan khusus bahwa mereka juga adalah siswa SD Negeri 1 dan juga berhak menerima hak pengajaran dan lainnya sama seperti siswa normal lainnya, mengakui keberadaan mereka sebagai siswa SD Negeri 1 Mangkubumi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya secara garis besar semua kegiatan belum berjalan dengan baik hal ini bisa dibuktikan dari jawaban narasumber yang menyatakan bahwa hampir semua kegiatan dilihat dari indikator yang ada belum dilaksanakan dengan optimal.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

dapat dikatakan secara keseluruhan belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Hasil wawancara dengan para informan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:

- a) Biaya operasional yang terbatas, sehingga sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menyeluruh.
- b) Sosialisasi yang diadakan kadang kurang direspon baik oleh masyarakat.
- c) Wali murid malu untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah formal.
- d) Tidak adanya guru pembimbing membuat guru biasa bekerja extra dalam penyampaian kegiatan belajar.

3. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- a) Memaksimalkan biaya operasional yang ada, karena sosialisasi harus tetap tersampaikan kepada masyarakat.
- b) Terus mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif hingga benar dipahami masyarakat.
- c) Menghilangkan paradigma masyarakat bahwa anak berkebutuhan khusus tidak akan dikucilkan.
- d) Karena proses belajar harus tetap berlangsung maka guru pamong bekerja ekstra agar materi pembelajaran tetap sampai (dimegerti) siswa berkebutuhan khusus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dengan biaya operasional yang terbatas, sosialisasi hendaknya tetap sampai kepada masyarakat guna terwujudnya program pemerintah. Sehingga Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berjalan lancar dan optimal.
2. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin timbul kembali seperti tidak adanya guru pembimbing khusus. Guru pamong hendaknya tetap memberikan pengajaran sehingga proses belajar tetap berjalan dan siswa yang

berkebutuhan khusus merasa sama mendapatkan haknya.

3. Dalam upaya membangun dan menjalin interaksi sosial serta tumbuhnya sikap saling menghargai sesama siswa SD Negeri 1 Mangkubumi selain membangun dan menjaga mental siswa yang berkebutuhan khusus. Kelompok kerja penyelenggara pendidikan inklusif beserta guru pamong lainnya, tidak sampai melupakan hak bagi siswa normal yang sama harus mendapatkan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solihin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : PUSTAKA SETIA.

Heryani, Ani. 2010. *Paradigma Kebijakan Publik*. Bandung : UNPAD PRESS.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pedoman Umum Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Kusnandar, Ishak. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Multazam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2009. Balai Pustaka.

Lay.Kekeh.Marentek,dkk. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: DepdiknasRI

Lexi J. Maleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.

- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nugroho Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta : Kompas Gramedia.